

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Namedah Vavati Mooy
Universitas Nusa Cendana

Petrus E. De Rozari
Universitas Nusa Cendana

Cicilia A. Tungga
Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis : medahmooy2001@gmail.com

Abstract This study was conducted with the aim of determining the effect of Economic Growth (GRDP), Regional Original Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Regional Expenditure in South Central Timor Regency. The analysis method used is multiple linear regression. The results of this study indicate that partially the economic growth variable has a positive and significant effect on regional expenditure, the regional own-source revenue variable has a positive and significant effect on regional expenditure, the general allocation fund variable has a positive and significant effect on regional expenditure and the special allocation fund variable has a positive and significant effect on regional expenditure in South Central Timor Regency. Simultaneously or together, the variables of economic growth, local revenue, general allocation funds and special allocation funds have a significant effect on regional expenditure in South Timor Tengah Regency.

Keywords: Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Funds, Regional Expenditure

Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dan variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Secara simultan atau bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah dan digunakan untuk belanja daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Belanja Daerah sendiri terdiri atas kelompok belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, tak terduga dan kelompok belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sedangkan untuk sumber pembiayaan daerah menurut Permendagri No.13 tahun 2006 berasal dari SiLPA, dana cadangan, investasi, pinjaman atau obligasi, dan piutang daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi Pemerintah daerah sehingga kualitas Pelayanan Publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan PAD tidak diikuti dengan kenaikan anggaran Belanja Daerah yang signifikan, disebabkan karena PAD tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selama satu tahun anggaran, sehingga hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Salah satu Dana Perimbangan Pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004). Tolak ukur keberhasilan DAU, salah satunya adalah tercapainya pemerataan total penerimaan daerah per kapita yang sebaik-baiknya. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan Pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja daerah di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan. Kegiatan tersebut mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Alasan pemilihan lokasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan dikarenakan terdapat fenomena atau masalah yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah yang mengalami fluktuatif selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2013-2022.

Belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun ke tahun selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan dan juga penurunan, dimana sampai pada tahun 2021 belanja daerah mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 30,197%. Kemudian pada 2019 belanja daerah mengalami penurunan sebesar -4,957%.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) mengalami peningkatan dan penurunan, dengan persentase peningkatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar 9,965%. Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori menurut (Kusumawati & Wiksuana, 2018) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sedangkan kondisi PAD tidak stabil, dengan peningkatan tertinggi tahun 2017 yaitu sebesar 189.534.208 dan mengalami penurunan paling signifikan pada tahun 2018 sebesar -62,282%. Melihat fenomena tersebut, Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan harus lebih memikirkan dan bertindak lebih untuk menggali potensi yang ada di daerahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 tahun

2009. Undang-undang ini mencerminkan keleluasaan daerah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan dari daerahnya sendiri seperti pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan menurunnya ataupun kurang stabilnya kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah, maka dibutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi DAU dan DAK mengalami peningkatan dan juga penurunan, dimana sampai pada tahun 2014 DAU mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 8,554%. Kemudian pada tahun 2020 DAU mengalami penurunan paling signifikan sebesar -8,656%. Sedangkan kondisi DAK persentasenya tidak stabil, dimana tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 86,412%. Kemudian pada tahun 2017, 2018, dan 2019 DAK mengalami penurunan masing-masing sebesar 34,956%, 33,822% dan -15,844%. Kemudian kembali terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 3,834%, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan paling signifikan sebesar -57,436% dan terjadi lagi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 58,214%. Meskipun kondisi DAU dan DAK sempat mengalami penurunan tetapi bisa dikatakan bahwa DAU dan DAK ikut berperan dalam membiayai operasional belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka pemerataan keuangan antar daerah. Hal ini sesuai dengan teori dari (Akhmad, 2019) yang mengatakan bahwa tujuan pembentukan DAU adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah dimana salah satunya adalah tercapainya pemerataan total penerimaan daerah per kapita yang sebaik-baiknya. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, kenaikan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur murah panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK buat aktivitas tersebut diharapkan bisa tingkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah Ardhani (2015).

Pada tahun 2021 belanja daerah mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar Rp 1.402.623.237 atau meningkat sebesar 30,197% dikarenakan terjadi peningkatan anggaran pada belanja tidak langsung sebesar Rp 381.170.489.896. Sedangkan pada tahun 2019 belanja daerah mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 1.130.429.433 atau -4,957% dikarenakan terjadi penurunan pada belanja langsung sebesar Rp 1.130.341.744.089 atau -4,964%.

Pada tahun 2017 PAD mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar Rp 189.534.208 atau meningkat sebesar 163,796% dari tahun sebelumnya dikarenakan terjadi peningkatan yang didominasi oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu sebesar Rp 167.084.653 atau 217,968% dari keseluruhan PAD yang ada dan mengalami penurunan tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp 71.487.909 atau -62,282%.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), PAD, DAU, DAK di Kabupaten Timor Tengah Selatan terutama pengaruhnya terhadap Belanja Daerah dan bermaksud untuk menuangkan ke dalam bentuk penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan”.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dan menggunakan data kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif menggunakan data sekunder. Teknik Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi menggunakan alat uji SPSS.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1
Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Tolerance</i>	<i>Statistics VIF</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>					
<i>(Constant)</i>	-5.500	2,117		-2598	,048		
Pertumbuhan Ekonomi	3,458	,300	,602	11,521	,000	,733	1,364
PAD	1,301	,354	,222	3,671	,014	,548	1,825
DAU	,806	,153	,293	5,281	,003	,649	1,540
DAK	,143	,046	-,169	3,131	,026	,686	1,457
<i>a. Dependent Variable : Belanja Daerah</i>							

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat nilai konstanta (nilai α) sebesar -5.500 dan untuk Pertumbuhan Ekonomi (nilai β) sebesar 3,458 sementara PAD (nilai β) sebesar 1,301, DAU (nilai β) sebesar 0,806 dan DAK (nilai β) sebesar -0,143. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$BD = -5.500 + 3,458PE + 1,301PAD + 0,806DAU + 0,143DAK$$

Model persamaan regresi tersebut bermakna :

1. Nilai konstanta sebesar -5.500 artinya jika variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK bernilai nol maka belanja daerah sebesar -5.500.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar 3,458 artinya setiap ada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan belanja daerah sebesar 3,458 dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel PAD (X2) sebesar 1,301 artinya setiap ada peningkatan PAD sebesar 1% akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,301 dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel DAU (X3) sebesar 0,806 artinya setiap ada peningkatan DAU sebesar 1% akan meningkatkan belanja daerah sebesar ,806 dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel DAK (X4) sebesar 0,143 artinya setiap ada peningkatan DAK sebesar 1% akan meningkatkan belanja daerah sebesar ,143 dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada variabel pertumbuhan ekonomi, variabel PAD, variabel DAU, dan variabel DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

<i>Variabel</i>	<i>Collinearity Statistis</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	,733	1,364
PAD (X2)	,548	1,825
DAU (X3)	,649	1,540
DAK (X4)	,686	1,457

Berdasarkan hasil olahan SPSS pada tabel 2, diketahui bahwa :

1. Nilai VIF variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah $1,364 < 10$ dan nilai tolerance $0,733 > 0,1$.
2. Nilai VIF variabel PAD adalah $1,825 < 10$ dan nilai tolerance $0,548 > 0,1$.
3. Nilai VIF variabel DAU adalah $1,540 < 10$ dan nilai tolerance $0,649 > 0,1$.
4. Nilai VIF variabel DAK adalah $1,457 < 10$ dan nilai tolerance $0,686 > 0,1$.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1), variabel PAD (X2), variabel DAU (X3) dan DAK (X4) tidak terjadi gejala multikolinearitas sehingga boleh dilakukan pengujian lanjutan.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 3
Uji Autokorelasi

<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	1,533
a. Predictors: (Constant), DAK, Pertumbuhan Ekonomi, DAU, PAD	
b. Dependent Variable : Belanja Daerah	

Dari hasil perhitungan menggunakan program SPSS pada tabel 3 diperoleh nilai Durbin-Watson (d) adalah 1,533. Sedangkan dari tabel D-W diperoleh nilai dL sebesar 0,3760 dan dU sebesar 2,4137 sehingga diperoleh $dL 0,3760 \leq d 1,533 \leq dU 2,4137$. Setelah melihat angka-angka tersebut dan dilihat dari analisis deteksi adanya autokorelasi atau tidak, dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif dalam hasil pengujian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

<i>Variable</i>	<i>Sig.</i>
Pertumbuhan Ekonomi	,792
PAD	,985
DAU	,436
DAK	,960
a. Dependent Variable : ABS RES	

Berdasarkan hasil olahan SPSS pada tabel 4 diketahui bahwa :

1. Nilai signifikansi variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah $0,792 > 0,05$.
2. Nilai signifikansi variabel PAD adalah $0,985 > 0,05$.
3. Nilai signifikansi variabel DAU adalah $0,436 > 0,05$.
4. Nilai signifikansi variabel DAK adalah $0,960 > 0,05$.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel Pertumbuhan Ekonomi, variabel PAD, variabel DAU, dan DAK tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga boleh dilakukan uji lanjutan.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel 5

Uji t

<i>Variable</i>	T_{hitung}	T_{tabel}	0,05	Sig.	Keputusan
Pertumbuhan Ekonomi	11,521	2,570	0,025	,000	H1 Diterima
PAD	3,671	2,570	0,025	,014	H2 Diterima
DAU	5,281	2,570	0,025	,003	H3 Diterima
DAK	3,131	2,570	0,025	,026	H4 Diterima

$$\begin{aligned}t \text{ tabel} &= t (\alpha/2 : n-k-1) \\ &= t (0,05/2 : 10-4-1) \\ &= (0,025 : 5) \\ &= 2,570\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada tabel 5 diketahui bahwa:

1. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap variabel belanja daerah (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $11,521 > 2,570$ maka H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013-2022.
2. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh PAD (X2) terhadap variabel belanja daerah (Y) adalah $0,014 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,671 > 2,570$ maka H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013-2022.
3. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh DAU (X3) terhadap variabel belanja daerah (Y) adalah $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,281 > 2,570$ maka H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif.
4. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh DAK (X4) terhadap variabel belanja daerah (Y) adalah $0,026 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,131 > 2,570$ maka H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DAK berpengaruh positif.

b. Uji F

Tabel 6
Uji F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F_{hitung}</i>	<i>F_{tabel}</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Regresion</i>	81,674	4	20,419	123,662	4,53	,000 ^b	H5 Diterima
<i>Residual</i>	,826	5	,165				
<i>Total</i>	82,500	9					

a. *Dependent Variable* : Belanja Daerah
b. *Predictors* : (Constant), DAK, Pertumbuhan Ekonomi,DAU,PAD

$$F \text{ tabel} = F (k : n-k)$$

$$= F (4 : 10-4)$$

$$= F (4 : 6)$$

$$= 4,53$$

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada tabel 6 diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi (X1), variabel PAD (X2), variabel DAU (X3) dan variabel DAK (X4) secara simultan terhadap variabel belanja daerah (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $123,662 > 4,53$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah di kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013-2022.

4. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Tabel 7
Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>R Square Change</i>	<i>F Change</i>	<i>dff</i>	<i>df2</i>	<i>Sig. F Change</i>	<i>Durbin Watson</i>
1	,995 ^a	,990	,982	,406	,990	123,662	4	5	,000	1,533

a. *Predictors* : (Constant), DAK, Pertumbuhan Ekonomi,DAU,PAD
b. *Dependent Variable* : Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pada tabel 7, didapatkan nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,982. Hal ini berarti kemampuan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dalam menjelaskan belanja daerah sebesar 98,2%.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini dikarenakan PDRB Timor Tengah Selatan meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2013-2022 walaupun jika dilihat pada belanja daerahnya mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 tetapi tetap meningkatkan pertumbuhannya ekonominya. Berarti dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan belanja daerah yang baik pula yakni dengan meminimalisir belanja daerah secara efektif dan efisien. Secara tidak langsung dalam penelitian ini memberikan gambaran dimana pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pendapatan dan belanja daerah dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan teori dari (Sihombing, 2017) yang mengatakan bahwa besar kecilnya dana yang dibutuhkan salah satunya bergantung pada sektor pendapatan daerah dimana pendapatan tersebut dapat menjadi sumber pembelanjaan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

Peran atau fungsi pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dimana fungsi tersebut ialah sebagai fungsi pembangunan yang ditunjukkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kebijakan pembangunan tersebut, perlu adanya kebijakan penganggaran alokasi dana sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari et al (2013) yang mengatakan bahwa semakin tinggi pengeluaran belanja daerah maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi yang ada, kemudian dipertegas oleh Malau et al (2018) yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan daerah akibat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kemandirian daerah dalam mendanai tugas daerah semakin besar, terutama belanja daerahnya. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko dan Pradipta (2018) dimana hasil penelitian bahwa Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Artinya, dengan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sejalan dengan meningkatnya jumlah belanja daerah

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator kemandirian suatu daerah dalam mengatur keuangan daerah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Teori dari Sihombing (2017) menyatakan semakin tinggi penghasilan seseorang maka kesanggupan untuk membayar semakin tinggi pula. Setiap kenaikan maupun penurunan pada pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kurun waktu 2013-2022.

Alasan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan dalam wilayah daerah itu sendiri karena PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai kemandirian suatu daerah dan tolak ukur untuk keberhasilan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dituntut untuk menggali potensi-potensi yang berasal dari wilayahnya sendiri agar dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada masyarakat. Meskipun begitu, PAD di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum sepenuhnya memenuhi belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradipta dan Jatmiko (2018), Wulandari et al (2013), Malau et al (2018), Sumangkut et al (2016), dan Thamus (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan, tidak sejalan dengan penelitian Rusmita (2016), dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dimana Pemerintah Kabupaten/Kota masih tergantung oleh DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Artinya, dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang ditandai dengan peningkatan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sejalan dengan meningkatnya jumlah belanja daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah. DAU menjadi jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dana transfer ini akan menambah alokasi Belanja Daerah yang berguna untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Terlebih lagi adanya tujuan untuk pemerataan dengan memperhatikan kondisi sekitar sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil (UU no.33 tahun 2004). Sehingga dengan ini Pemerintah Daerah akan memacu untuk terus mengembangkan daerahnya dengan menggunakan Belanja Daerah yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Setiap kenaikan pada dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kurun waktu 2013-2022. Hal ini dikarenakan belanja untuk gaji pegawai lebih banyak proporsinya diambil dari dana alokasi umum. Selain itu juga sisa dari DAU yang ada di kabupaten Timor Tengah Selatan digunakan untuk membelanjakan administrasi pada program-program proyek. Hal ini sesuai dengan teori dari (Rosidin, 2017) yang mengatakan bahwa meskipun kekayaan keuangan semakin besar, tetapi tidak ada satupun daerah yang secara penuh mampu memenuhi belanja rumah tangganya sendiri, dimana sebagian besar keuangan daerah berupa subsidi dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari (Mardiasmo, 2017) yang menyatakan bahwa kewenangan yang daerah miliki tidak sekedar penggunaan PAD saja, melainkan juga kewenangan penggunaan dana perimbangan berupa DAU dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk menangani keperluan belanja daerah. Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari et al (2013), Malau et al (2018), Sumangkut et al (2016) dan Thamus (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Jatmiko (2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Rusmita (2016), dimana hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Artinya, dengan peningkatan pada dana alokasi umum sejalan dengan meningkatnya jumlah belanja daerah yang ditandai dengan peningkatan pada pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dari hasil penelitian bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah. Setiap kenaikan pada dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kurun waktu 2013-2022. Hal ini dikarenakan DAK yang ada di kabupaten Timor Tengah Selatan digunakan untuk membelanjakan administrasi pada program-program pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori dari (Rosidin, 2017) yang mengatakan bahwa meskipun kekayaan keuangan semakin besar, tetapi tidak ada satupun daerah yang secara penuh mampu memenuhi belanja rumah tangganya sendiri, dimana sebagian besar keuangan daerah berupa subsidi dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Latifah (2010) membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasara pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009), membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Artinya, dengan peningkatan pada dana alokasi khusus sejalan dengan meningkatnya jumlah belanja daerah yang ditandai dengan peningkatan pada pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kurun waktu 2013-2022. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja daerah. Apabila kualitas Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus meningkat yang ditandai dengan pembangunan ekonomi, maka akan mempengaruhi peningkatan pada Pertumbuhan Ekonomi dan berdampak pada peningkatan belanja daerah pula. Dengan kata lain, apabila pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menggunakan dan memanfaatkan secara baik dan produktif sehingga Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tetap stabil serta semakin meningkat, maka belanja daerah pun semakin meningkat pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Sihombing, 2017) yang menyatakan bahwa besar kecilnya dana yang dibutuhkan salah satunya bergantung pada perkembangan sektor pendapatan daerah dimana pendapatan tersebut menjadi sumber pembelanjaan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari et al (2013), Malau et al (2018), Sumangkut et al (2016), pradipta dan jatmiko (2018) dan Thamus (2020) yang menyatakan bahwa secara simultan apabila pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum meningkat maka belanja daerah juga meningkat, begitupun sebaliknya apabila Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum menurun maka belanja daerahnya juga menurun. Latifah (2010) membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009), membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa, ada hubungan positif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah, artinya semakin baik Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang ditandai dengan peningkatan pembangunan maka semakin baik pula Belanja Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kurun waktu 2013-2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian analisis data dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini dikarenakan PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan meningkat dari tahun ke tahun.
2. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai kemandirian suatu daerah dan tolak ukur untuk keberhasilan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Secara parsial variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini dikarenakan sebagian besar Belanja Daerah terutama belanja pegawai di Kabupaten Timor Tengah Selatan berasal dari Dana Alokasi Umum.
4. Secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini dikarenakan sebagian besar Belanja Daerah terutama belanja pembangunan infrastruktur di Kabupaten Timor Tengah Selatan berasal dari Dana Alokasi Khusus.

Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar terus membenahi kinerja keuangan daerah dan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membuat kebijakan-kebijakan baru seperti memberikan kemudahan akses pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara efektif, efisien, dan cepat serta mendata subjek dan objek pajak baru di daerah potensial. Selain itu juga perlu adanya peningkatan produksi PDRB bukan hanya di sektor pertanian tetapi juga di sektor lainnya seperti industri dan pariwisata dengan mengembangkan berbagai inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan produksi.

2. Bagi penelitian selanjutnya agar kiranya penelitian ini dapat dijadikan rujukan dimasa mendatang dengan menyarankan menambah atau menggunakan variabel lain seperti Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggeraini, U. D., & Suhardjo, Y. (2010). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal SOLUSI*, 74.
- Akhmad. (2019). *Manajemen keuangan daerah dalam era otonomi daerah*. Bogor: Azkiya Publishing.
- Arioyuda, F., & Sbm, N. (2020). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap alokasi belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Tahun 2013-2017). 9, 132–141.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomi otonomi daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Daerah, B., Kota, K., & Provinsi, D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus terhadap belanja daerah. 03, 1–15.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gulo, H. (2022). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, November, 25–31.
- Handayani, N. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menurut perspektif ekonomi Islam (Skripsi). Program Strata Satu Ilmu Ekonomi, UIN Raden Intan.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi makro*. Depok: Kencana.
- Heryani. (2021). *Produk domestik regional bruto*. Kabupaten Musi Rawas: Badan Pusat Statistik.
- Issn, P. (2022). Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2010-2019. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2).
- Jiwatami, S. (2013). Pengaruh kemandirian daerah, dana perimbangan, dan belanja pegawai terhadap belanja modal pemerintah daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado, 25-28 September 2013.
- Latifah, R. (2010). Hubungan antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Malau, Y. N., Listayani, W., Sagala, V. C. B., & Lestari, D. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja daerah Provinsi Aceh 2013-2017. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(8), 709-728. ISSN 2337-3067.
- Mardiasmo. (2017). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murni, A. (2017). *Ekonomika makro edisi revisi*. Bandung: Rafika Aditama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pradipta, W. T., & Jatmiko, B. (2018). Pengaruh flypaper effect, pendapatan asli daerah (PAD) dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap belanja daerah (Studi empiris pada provinsi di Indonesia tahun 2014-2016). *Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 171-185. P-ISSN 2721-2238, E-ISSN 2716-4977.
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar ekonomi makro*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Diana, E. B., Purnama, A. K., Damanik, D., Faeried, A. I., Lie, D., Fazira, N., Rozaini, N., Tanjung, R., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi pembangunan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Putrisandya, A. A., & Dewi, M. H. U. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, PDRB terhadap belanja daerah dan indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 10(11), 4717-4744.
- Rosidin. (2017). *Otonomi daerah dan desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salam, D. S. (2004). *Otonomi daerah dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya*. Bandung: Djambatan.
- Sihombing, Y. L. V. (2017). *Manajemen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)*. Medan: Bina Media Perintis.
- Simanjuntak, B. A. (2017). *Kosepku mensukseskan otonomi daerah: Membangun Indonesia berkeadilan sosial-ekonomi (informasi rujukan deskriptif untuk ilmu antarpologi politik, antarpologi budaya, antarpologi gender, antarpologi ekonomi, dan sosial ekonomi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siregar, S. (2017). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap pendapatan per kapita pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Skripsi). *Program Strata Satu Ilmu Ekonomi, USU*.
- Situngkir, A. (2009). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah (Tesis). Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Sukirno, S. (2007). Makro ekonomi modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2017). Makroekonomi teori pengantar ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumangkut, E. Y., Kindagen, P., & Walewangko, E. (2016). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 18(2). ISSN 1907-3593.
- Thamus, D. H. (2020). The analysis of local own revenue and grant expenditures on regional expenditures of Central Kalimantan Province. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities*, 3(4), 3526-3539. ISSN 2615-3076.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Wulandari, F., Asrizal, & Jolianis. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB), pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah (Studi kasus pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2005-2012). *Pendidikan Ekonomi*, 2(2).

www.bps.go.id